

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN  
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI  
INDONESIA TAHUN 1986-2015**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Pendidikan



Oleh:  
IRHAMNI  
11404241045

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2017

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN  
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI  
INDONESIA TAHUN 1986-2015**


**SKRIPSI**



Oleh:  
IRHAMNI  
11404241045

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 02 Oktober 2017  
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi  
Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta.

Disetujui  
Dosen Pembimbing



Dr. Maimun Sholeh, M.Si  
NIP. 19660606 200501 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



Skripsi yang berjudul:

### **PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1986-2015**

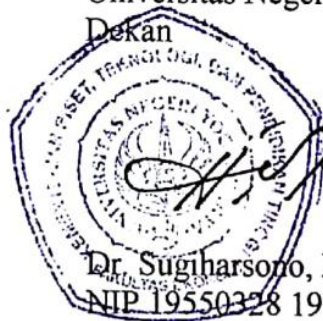
Oleh:  
IRHAMNI  
NIM. 11404241045

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan  
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
pada 12 Oktober 2017 dan dinyatakan lulus.

#### DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Aula Ahmad Hafidh SF, SE.,M.Si	Ketua Penguji		20-10-2017
Dr. Maimun Sholeh, M.Si.	Sekretaris Penguji		20-10-2017
Mustofa, S.Pd.,M.Sc.	Penguji Utama		20-10-2017

Yogyakarta, 23 Oktober 2017  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan



Dr. Sugiharsono, M. Si  
NIP. 19550328 198303 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irhamni

NIM : 11404241045

Jurusan : Pendidikan Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran  
Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar.

Yogyakarta, 10 Oktober 2017

Yang menyatakan,



Irhamni

NIM. 11404241045

## MOTTO

*"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu mengubah keadaan mereka sendiri"*

(QS. Ar-Ra'd 13: 11)

*"Semua itu akan selalu terlihat mustahil sampai kita sendiri yang menyelesaikannya"*

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan kehadiran Alloh SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Kedua orangtuaku tersayang (Alm. Bapak Saefudin & ibu Kholishah), trimakasih sudah menjadi orangtuaku.
- Saudara-saudari kandungku.
- Sahabat-sahabati PMII yang membuatku merasa belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kalian.
- Orang spesial dan baik yang tak bisa disebutkan namanya disini.

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN  
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI  
INDONESIA TAHUN 1986-2015**

**Oleh:  
IRHAMNI  
NIM. 11404241045**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1986-2015.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder Indonesia dari tahun 1986-2015. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *time series* dengan model OLS (*Ordinary Least Square*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar 6,257149 dalam jangka panjang. (2) Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar 0,194924 dalam jangka panjang. (3) Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan sebesar -0,299375 dalam jangka panjang. (4) Variabel jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan dalam jangka panjang.

**Kata Kunci:** *jumlah penduduk, pengangguran, pengeluaran pemerintah, kemiskinan*

**THE EFFECTS OF THE TOTAL POPULATION, UNEMPLOYMENT, AND  
GOVERNMENT SPENDING ON THE POVERTY IN INDONESIA  
IN 1986-2015**

**By:  
IRHAMNI  
NIM. 11404241045**

**ABSTRACT**

*This research aimed to find out the effects of total population, unemployment, and government spending on the poverty in Indonesia in 1986-2015.*

*This research used the quantitative approach. The data were secondary data in Indonesia from 1986 to 2015. The data analysis technique was the time series data analysis using the OLS (Ordinary Least Square) model.*

*The result of the research showed that: (1) the variable of total population had a significant positive effect on the poverty by 6,257149 in the long term. (2) the variable of unemployment had a significant positive effect on the poverty by 0,194924 in the long term. (3) the variable of government spending had a significant negative effect on the poverty by 0,299375 in the long term. (4) the variables of total population, unemployment, and government spending as an aggregate affected the poverty in the long term.*

**Keywords:** *total population, unemployment, government spending, poverty*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015” dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Sutrisna Wibawa, M.Pd selaku Rektor UNY yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masa studi.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si selaku Dekan FE UNY yang telah memberikan ijin untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Tejo Nurseto, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ijin untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan studi pada program studi Pendidikan Ekonomi.
4. Bapak Mustofa, S.Pd., M.Sc selaku Dosen narasumber, Penguji Utama sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan pengarahan selama penyusunan skripsi dan selama kuliah Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses studi.
5. Bapak Dr. Maimun Sholeh, M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketelitian serta memberikan saran yang membangun untuk penulisan skripsi ini.
6. Bapak Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, SE., M.Si selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji.
7. Bapak Dating Sudrajat, selaku Admin Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah membantu penulis dalam pemenuhan kelengkapan administrasi.

8. Bapak dan Ibu dosen jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama ini.
9. Sahabat-sahabati yang ada di PMII Komisariat Hasyim Asy'ary, PMII Cabang Sleman, dan alumni yang menjadi tempat “kekancan” sehari-hari selama berada di Yogyakarta, semoga kita akan menjadi keluarga selamanya.
10. Kawan-kawan DPM FE UNY 2014 yang banyak memberi bantuan dan pengalaman tentang berorganisasi selama ini.
11. Seluruh teman-teman Pendidikan Ekonomi, khususnya teman-teman seperjuanganku kelas 2011 yang telah menjadi keluarga yang baik dalam masa perkuliahan. Semoga kesuksesan mengiringi langkah kita semua.
12. Guru dan pengelola MA Nur Iman Sleman yang menjadi bagian tak perpisahkan dari perjalanan saya, semoga daya juang tidak pernah berhenti.
13. Keluargaku yang selalu mendoakan (ayah dan ibuk), memotivasi, dan terus memberi semangat yang tiada henti disaat penulis berada pada titik terendah dalam penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam studi hingga terselesaikannya Tugas Akhir Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Yogyakarta, 06 Oktober 2017

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irhamni', with a stylized, cursive script.

Irhamni

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teori .....	11
B. Penelitian yang Relevan .....	37
C. Kerangka Berpikir.....	39
D. Hipotesis Penelitian.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Desain Penelitian.....	42
B. Definisi Operasional dan Pengukuran variabel penelitian .....	42
C. Data dan Sumber Data .....	44
D. Teknik Analisis Data.....	45
1. OLS ( <i>Ordinary Least Squares</i> ) .....	45
2. Uji Asumsi Klasik .....	46
a. Uji Normalitas .....	46
b. Uji Linearitas.....	47
c. Uji Multikolinieritas.....	47
d. Uji Autokorelasi .....	48
e. Uji Heteroskedastisitas.....	49

3. Uji Hipotesis .....	50
a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	50
b. Uji Parsial (Uji Statistik t).....	50
c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Deskripsi Data.....	52
B. Uji Asumsi Klasik.....	58
1. Uji Normalitas .....	58
2. Uji Linearitas.....	59
3. Uji Multikolinearitas .....	59
4. Uji Autokorelasi .....	60
5. Uji Heteroskedastisitas .....	62
C. Hasil Estimasi .....	62
D. Uji Statistik .....	64
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Keterbatasan Penelitian.....	78
C. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian Relevan .....	37
2. Uji Normalitas .....	58
3. Uji Linearitas.....	59
4. Uji Multikolinearitas .....	60
5. Uji Multikolinearitas <i>Difference</i> .....	60
6. Uji Autokorelasi .....	61
7. Uji Autokorelasi <i>Difference</i> .....	61
8. Uji Heteroskedastisitas.....	62
9. Hasil Estimasi OLS .....	63
10. Hasil Uji Statistik F.....	64
11. Hasil Uji Statistik t.....	65
12. Hasil Regresi .....	67

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Paradigma Penelitian .....	40
2. Grafik Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015 dalam Jiwa.....	53
3. Grafik Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1986-2015 dalam Jiwa .....	54
4. Grafik Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 1986-2015 dalam Jiwa .....	55
5. Grafik Pengangguran Indonesia Tahun 1986-2015 dalam Jiwa .....	56
6. Grafik Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1986-2015 dalam Dollar AS .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Data kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah Tahun 1986-2015 .....	85
2. Hasil Estimasi OLS .....	86
3. Uji Normalitas .....	86
4. Uji Linearitas .....	87
5. Uji Multikolinearitas .....	88
6. Uji Multikolinieritas ( <i>Difference</i> ) .....	88
7. Uji Autokorelasi .....	89
8. Uji Autokorelasi ( <i>Difference</i> ) .....	90
9. Uji Heteroskedastisitas .....	91

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu negara di belahan dunia manapun. Kemiskinan bahkan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah negara dari waktu ke waktu, terlebih pada negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kategori berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menekannya dalam agenda tahunan pemerintah. Bahkan menjadi *masterplan* perencanaan pembangunan dalam jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Tentu sudah lumrah diketahui bahwa jika berbicara tentang kemiskinan tentu akan berbicara mengenai pembangunan, mengingat *term* ini adalah dua sumbu yang tak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dan terus-menerus untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan pembangunan nasional negara Indonesia sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Berbagai kegiatan pembangunan telah dilaksanakan pemerintah Indonesia demi tercapainya kesejahteraan umum. Masyarakat



dapat disebut sejahtera apabila masyarakat tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Sri, 2010: 358-366). Kesejahteraan dapat diartikan salah satunya dengan tingkat kemiskinan penduduk. Kesejahteraan sendiri mempunyai hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan, semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk.

Menurut para ahli ekonomi (Arsyad, 2010: 299) kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensial. Kemiskinan yang bersifat multidimensial dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Dilain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Wijayanti, 2005: 215 – 225).

Salah satu akar permasalahan kemiskinan yaitu jumlah penduduk yang tinggi. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang tinggi. Menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk menunjang tambahan permintaan, namun disisi lain kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000: 236) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus memproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara sifatnya, sebab permintaan efektif (*effective demand*) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang.

Akar permasalahan kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja yang tercipta tersebut, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2004: 28). Sedangkan menurut Mankiw (2006: 154), pengangguran adalah masalah

makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud, jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan begitu akan memberikan dampak domino mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan dan akan menimbulkan masalah lain yaitu kekacauan politik dan sosial (Sukirno, 2010: 24).

Penumpukan jumlah angkatan kerja tentu akan memberikan beban tambahan bagi perekonomian suatu negara apabila tidak disertai dengan perluasan dan penciptaan lapangan kerjanya. Jika lowongan kerja baru tidak bisa menampung semua angkatan kerja baru maka akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada (Dumairy, 1997: 68). Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pengangguran dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Kemiskinan sebagai masalah berskala nasional selalu dihadapi setiap pemerintahan. Kemiskinan terjadi dari akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan banyak dimensi pokok. Menurut Makmun dalam Rusdarti (2013: 1-9) kemiskinan memiliki empat dimensi pokok, yaitu: (1) kurangnya kesempatan/*lack of opportunity*; (2) rendahnya kemampuan/*low of*

*capabilities*; (3) kurangnya jaminan/*low- level of security*; dan (4) ketidakberdayaan/*low of capacity or empowerment*. Bank Dunia sendiri menyebut bahwa kemiskinan sebagai hasil dari akuntabilitas dan responsibilitas institusi negara (Word Bank 2001). Menyadari bahwa kemiskinan bersifat multi-dimensi dan mencerminkan akuntabilitas dan responsibilitas dari institusi negara, maka upaya pengentasan kemiskinan menjadi sala satu obyek tanggungjawab pemerintah.

Permasalahan kemiskinan menuntut adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan permasalahan kemiskinan dapat ditanggulangi. Campur tangan pemerintah lebih kurang sudah sering masyarakat dengar dan rasakan baik dalam tingkat nasional maupun daerah, contoh dalam setiap kampanye pemilihan umum selalu tersodor rencana program penanggulangan kemiskinan, dalam realisasinya pun sudah pernah ada Bantuan Langsung Tunai/Sementara, BOS dalam bidang pendidikan, asuransi kesehatan masyarakat miskin, PNPM (program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), raskin (beras miskin), dan lainnya. Didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 sendiri sudah diamanatkan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah masalah kemiskinan yang dialami oleh setiap warga negaranya.

Wujud konkrit dari adanya campur tangan pemerintah yaitu dengan adanya komponen pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang

terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Amalia, 2015: 183 – 189). Pengeluaran pemerintah yang digambarkan pada APBN pada prinsipnya bertujuan untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun terlihat bahwa mengalami tren naik, ini mengindikasikan bahwa meningkatnya peranan pemerintah dalam sektor ekonomi. Dumairy (1996: 158) menyebutkan bahwa pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Ini bukan berarti pemerintah ikut berbisnis, melainkan pemerintah harus berkontribusi menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi bahwa kemiskinan menjadi masalah diberbagai negara, terlebih lagi di negara berkembang seperti Indonesia. Tujuan pembangunan nasional negara Indonesia sendiri yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kemiskinan dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang penulis dapat identifikasi adalah:

1. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh;
2. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain akan menimbulkan efek ke arah kemiskinan;
3. Tingkat menurunnya kualitas kemakmuran dalam masyarakat karena pengangguran akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan;
4. Kemiskinan terjadi dari akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan banyak dimensi pokok yang membutuhkan campur tangan pemerintah;
5. Kemiskinan bersifat multi-dimensi yang memerlukan akuntabilitas dan responsibilitas dari institusi negara sebagai wujud tanggungjawab konstitusi.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ditemukan, maka penelitian terkait kemiskinan ini dibatasi pada faktor permasalahan jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti agar lebih fokus dan mendalam. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data selama 30 tahun.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh jumlah pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, jumlah pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia;
2. Mengetahui pengaruh jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia;
3. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia;
4. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk, jumlah pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuann;
  - b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya;
  - c. Sebagai salah satu sumber informasi tentang permasalahan perkembangan kemiskinan di Indonesia.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan untuk memperoleh gambaran mengenai jumlah penduduk, pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan serta melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini;



- b. Sebagai tambahan referensi bagi pemerintahan yang terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian lebih untuk mengatasi masalah kemiskinan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kemiskinan**

###### **a. Definisi Kemiskinan**

Ada banyak definisi dan konsep mengenai kemiskinan. Kemiskinan sekarang ini merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan memiliki aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan, serta keterampilan. Aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad, 2004: 237). Namun secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan.

Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) pada tahun 2004 mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,

sumber daya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Pendekatan ini dihitung menggunakan *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Jadi, dalam pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Kemiskinan dapat juga diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Todaro (2006: 232) mengatakan besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (*poverty line*). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum

tertentu atau di bawah “garis kemiskinan internasional”, garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US\$1 atau \$2 per hari dalam dolar paritas daya beli (PPP). Sedangkan, kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

b. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Nasikun dalam Suryawati (2005: 9), salah satu sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu: *population growth*, prespektif yang didasari oleh teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung. Seperti halnya dalam Mustika (2011: 13), tesis yang paling mendasar dari Malthus adalah bahwa “jumlah penduduk cenderung meningkat lebih cepat dari persediaan bahan makanan”. Berdasarkan tesis tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk tumbuh bagaikan deret ukur dan persediaan bahan makanan berdasar deret hitung. Akibatnya sumber daya bumi tidak mampu mengimbangi kebutuhan manusia yang terus bertambah dengan cepat. Hal itulah yang menimbulkan kemiskinan.

Menurut Todaro (1995: 37), menyatakan bahwa kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 1)

perbedaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan; 2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah negara berlainan; 3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya; 4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara; 5) perbedaan struktur industri; 6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik dan kelembagaan dalam negeri.

Menurut Sukirno (1981: 203) akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh perkembangan penduduk terhadap pembangunan akan tercipta apabila produktivitas sektor produksi sangat rendah dan dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran. Dengan berlaku keadaan ini maka pertambahan penduduk tidak akan menaikkan produksi, dan yang lebih buruk lagi masalah pengangguran akan menjadi lebih serius. Sedangkan menurut Dumairy (1996: 68), alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita menimbulkan masalah ketenagakerjaan.

#### c. Teori Lingkaran Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan dari Nurkse. Lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai

tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan dan ketertinggalan sumber daya manusia (yang tercermin oleh tingkat pendidikan yang rendah), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya (Kuncoro, 1997: 132).

#### d. Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Menurut Arsyad, secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Widodo, 2006: 298).

##### 1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini

dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Arsyad, 2004: 47). Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang paling mudah dimengerti. Namun, penentuan garis kemiskinan secara obyektif sulit dilaksanakan karena banyak faktor yang mempengaruhinya.

## 2) Kemiskinan Relatif

Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan.

## 2. Jumlah Penduduk

### a. Definisi Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Sedangkan menurut Said (2012: 136) yang dimaksud dengan

penduduk adalah “jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi”.

Reverend Thomas Maltus pada tahun 1798 (Arsyad, 2004: 223) mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, ia melukiskan konsep hasil yang menurun (*concept of diminishing return*). Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

Menurut Maier (Kuncoro, 1997: 17) di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap *supply* bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan



tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu:

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit;
- 2) Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian Karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya;
- 3) Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

Telaah lain menunjukkan bahwa penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi; satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertumbuhan penduduk dengan tingkat penghasilan rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi. Disisi lain, alasan penduduk dipandang logis sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Dumairy, 1996: 68).

Bagi negara-negara berkembang keadaan perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Karena akan selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Jadi, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling

tidak terdapat kesulitan memperoleh kesempatan kerja. Jika mereka tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur, maka justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah.

Penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya perkembangan ekonomi yang terus-menerus. Semua ini memerlukan lebih banyak investasi. Bagi negara berkembang, cepatnya perkembangan penduduk menjadi sebuah ganjalan dalam perkembangan ekonomi, karena negara-negara ini memiliki sedikit kapital.

Todaro (2000: 144), menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka *output* hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

Meskipun terdapat pertentangan mengenai konsekuensi positif dan negatif yang ditimbulkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk, namun selama beberapa dekade mulai muncul gagasan

baru. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Robert Cassen dalam Todaro (2006: 351) sebagai berikut:

- 1) Persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materiil;
- 2) Pertumbuhan penduduk yang cepat memang mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Laju pertumbuhan penduduk yang terlampau cepat meskipun memang bukan merupakan penyebab utama dari keterbelakangan, harus disadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan di banyak negara;
- 3) Pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan dan hal itu merupakan masalah yang utama harus dihadapi negara-negara Dunia Ketiga. Mereka kemudian mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat mendorong timbulnya berbagai macam masalah ekonomi, sosial dan psikologis yang melatarbelakangi kondisi keterbelakangan yang menjerat negara-negara berkembang.

Pertumbuhan penduduk juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik karena mengurangi tabungan rumah tangga dan juga negara. Di samping itu, jumlah penduduk yang terlampau

besar akan menguras kas pemerintah yang sudah sangat terbatas untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi dan sosial bagi generasi baru. Melonjaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. (Todaro, 2006: 259-260).

### **3. Pengangguran**

#### **a. Pengertian Pengangguran**

Menurut Sukirno (2004: 28) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya

perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri.

Pada masa sekarang usaha-usaha mengurangi pengangguran adalah dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan secara matang. Di samping itu, disertai pula kesadaran akan ketenagakerjaan yang lebih demokratis menyangkut hak-hak memilih pekerjaan, lapangan pekerjaan, lokasi pekerjaan sesuai kemampuan, kemauan tenaga kerja tanpa diskriminasi.

Menurut Sukirno (2008: 328-331), pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

- 1) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3% maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik;
- 2) Pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja;

- 3) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan;
- 4) Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri.

Sedangkan bentuk-bentuk pengangguran berdasarkan cirinya dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Pengangguran Musiman, adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan sebagainya;
- 2) Pengangguran Terbuka, pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja;
- 3) Pengangguran Tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien;
- 4) Setengah Menganggur, yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari). Disebut *Underemployment*.

#### b. Dampak Pengangguran

Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat memiliki dampak atau akibat buruk baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat. Salah satu dampak buruk pengangguran terhadap perekonomian yaitu menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Sedangkan salah satu dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat yaitu pengangguran dapat menyebabkan kehilangan mata percaharian dan pendapatan. Di negara-negara maju, para pengangguran memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran. Oleh sebab itu, mereka masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya. Mereka tidak perlu bergantung kepada tabungan mereka atau bantuan orang lain. Di negara-negara sedang berkembang tidak terdapat asuransi pengangguran dan karenanya kehidupan penganggur harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman/bantuan keluarga dan teman-teman (Nanga, 2001: 237).

#### c. Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan

Menurut Sukirno (2010: 50), salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan.



Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, hal ini yang dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Apabila pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

#### **4. Pengeluaran Pemerintah**

##### **a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Soediyono (1989: 94) Pengeluaran konsumsi pemerintah yang biasa disebut pengeluaran pemerintah, *government expenditure* atau *government purchase* meliputi semua pengeluaran yang pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Menurut Ilyas (1989: 38), pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1994: 169).

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor antara lain: proyeksi jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, serta pertimbangan politik dan keamanan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya tidak didasarkan pada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional.

#### b. Teori-Teori Pengeluaran Pemerintah

Ada beberapa ekonom yang mengemukakan teori-teori tentang pengeluaran pemerintah, berikut adalah beberapa teori tentang pengeluaran pemerintah:

##### 1) Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang

dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi dalam presentase terhadap GNP (*Gross National Product*) semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 1994: 170).

## 2) Hukum Wagner

Adolf Wagner mengemukakan dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menjelaskan peranan pemerintah yang semakin besar karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PkPP1}{PPK1} < \frac{PkPP2}{PPK2} < .. < \frac{PkPPn}{PPKn}$$

Keterangan:

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2, ...n : jangka waktu (tahun)

Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut *Organic theory of the state* yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat (Mangkoesebroto, 1994: 171-172).

## 3) Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara.

Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka memiliki kesediaan untuk membayar pajak.

Menurut mereka perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP (*Gross Domestic Product*) menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalkan karena ada perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluaran untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga harus meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*Displacement Effect*), yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Selain itu banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah

terjadinya perang, yang disebut efek inspeksi (*Inspection Effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah, yang disebut efek konsentrasi (*Concentration Effect*) (Mangkoesoebroto, 1994: 173-175).

#### 4) Teori Batas Kritis Colin Clark

Colin Clark menyatakan bahwa toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah dengan kata lain sektor pemerintah diperkirakan  $\pm 25\%$  GNP. Meskipun anggaran pemerintah seimbang, jika batas 25% GNP terlewati maka akan terjadi inflasi dan kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi disebabkan karena batas toleransi masyarakat menahan inflasi dan membayar pajak yang melebihi batas kritis tersebut (Soetrisno, 1982: 376).

#### c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sukirno dalam Ilyas (1989: 40) faktor yang bersifat ekonomi, politik dan sosial yang mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor yang bersifat ekonomi, adalah yang berhubungan dengan tujuan dalam pencapaian penggunaan tenaga penuh tanpa menimbulkan inflasi sehingga pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh dapat berjalan pesat;

- 2) Faktor bersifat politik dan sosial, adalah faktor yang memakai anggaran pengeluaran yang besar. Seperti menjaga pertahanan dan keamanan negara, bantuan-bantuan sosial, menjaga kestabilan politik dan lainnya.

d. Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai dengan peranan pemerintah yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Peranan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan menjadi stimulus dalam menurunkan angka kemiskinan dan beberapa persoalan pembangunan yang lain.

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor. Salah satunya adalah jumlah pajak yang diterima. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi suatu negara (Sukirno, 2012: 168).

Menurut Bank Dunia dalam laporan Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2006), bahwa di samping

pertumbuhan ekonomi dan layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi pendapatan maupun non-pendapatan) dengan beberapa hal. Pertama, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan.

e. Peran Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera. Menurut Dumairy (1999: 157-158) Pemerintah memiliki 4 peran yaitu:

- 1) Peran alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi sehingga terjadi optimalisasi dalam pemanfaatan dan efisiensi dalam produksi;
- 2) Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil – hasil ekonomi secara adil, wajar dan merata ke setiap daerah;



- 3) Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan mengembalikan perekonomian dalam keseimbangan jika terjadi *disequilibrium*;
- 4) Peran Dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.

f. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Ada beberapa klasifikasi mengenai pengeluaran pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1) Dilihat dari Berbagai Segi

Menurut Suparmoko (2003: 45) Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang;
- b) Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat;
- c) Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang;
- d) Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

Maka, pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan balas jasa masyarakat yang menerima jasa atau barang yang bersangkutan;
- b) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, di mana dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak progresif sehingga timbul redistribusi pendapatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat;
- c) Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak produktif, yaitu pengeluaran yang secara langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, objek-objek pariwisata dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat juga menaikkan penghasilan nasional dalam kaitannya jasa-jasa tadi;
- d) Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan. Misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik;

- e) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan datang pasti akan lebih besar.

## 2) Dilihat dari Pos-Pos Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan pos pengeluaran pemerintah yang ada di APBN dapat dibedakan sebagai berikut (Soetrisno, 1982: 339-340):

- a) Belanja rutin adalah belanja untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Belanja rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan;
- b) Belanja pembangunan adalah pengeluaran untuk pembangunan baik pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, gedung-gedung dan lainnya, maupun penataran dan training untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara dirinci menurut klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis belanja. Pengelompokan belanja negara menurut fungsi menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Sejak tahun 2005 mulai ditetapkan penyatuan anggaran antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta pengklasifikasian anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, organisasi dan fungsi. Klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain (Postur APBN Indonesia).

## B. Penelitian yang Relevan

Tabel 1. Penelitian Relevan

N o	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Restu Ratri Astuti (2015)	Analisis Pengaruh Jumlah penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2004-2012.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penduduk miskin</li> <li>• Jumlah penduduk</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kesehatan</li> </ul>	<i>Random Effect Model</i>	Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
2	Widya Ningsih Zebua, Djaimi Bakce, dan Syaiful Hadi (2015)	Analisis Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penduduk miskin</li> <li>• PDRB</li> <li>• Jumlah penduduk</li> <li>• Rata-rata lama sekolah</li> <li>• Usia harapan hidup</li> <li>• Pengangguran</li> <li>• Investasi</li> <li>• Pengeluaran</li> </ul>	OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> )	Hanya tiga variabel yang berpengaruh nyata terhadap kemiskinan: rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan, usia harapan hidup berpengaruh negatif,

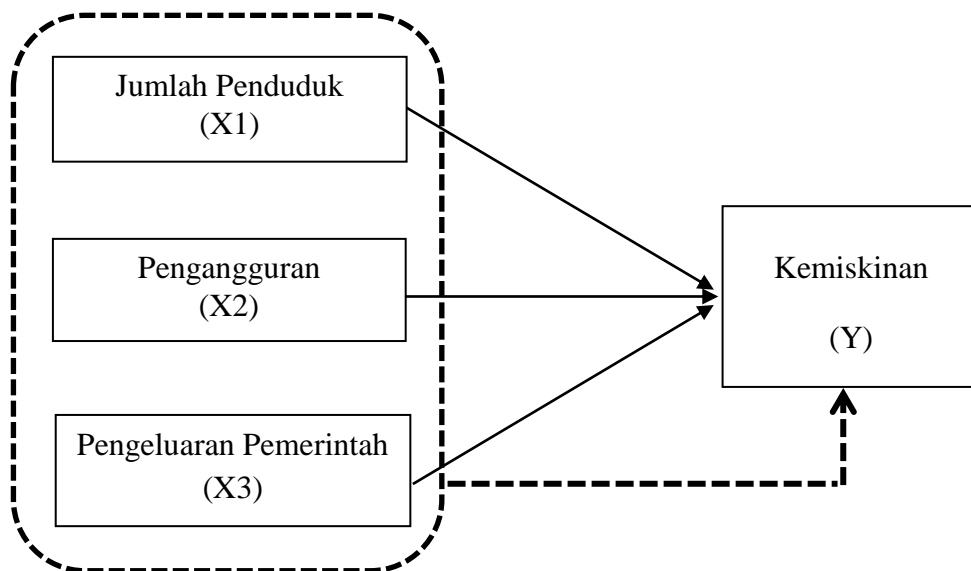
			pembangunan		pengangguran berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin
3	Fathul Mufid Cholili (2014)	Analisis Pengaruh Pengangguran, (PDRB), dan (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penduduk miskin</li> <li>• Pengangguran</li> <li>• PDRB</li> <li>• IPM</li> </ul>	Analisis regresi berganda ( <i>Multiple Regression</i> )	Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.
4	Fahma Sari Fatma (2005)	Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan</li> <li>• Inflasi</li> <li>• Pengangguran</li> </ul>	<i>Fixed Effect Model</i>	Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia
5	Fitri Amalia (2012)	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Pengangguran</li> <li>• Inflasi</li> </ul>	PLS ( <i>Pooled Least Square</i> )	Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di KTI
6	Seri Jefry Adil Waruwu (2016)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2004.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pengangguran</li> <li>• Belanja pemerintah</li> </ul>	Analisis regresi berganda ( <i>Multiple Regression Analysis</i> )	Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

7	Cadra Mustika (2011)	Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan</li> <li>• PDB</li> <li>• Jumlah penduduk</li> </ul>	OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> )	PDB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
8	Estomihi Hutabarat & D. Sriyono	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2013).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan</li> <li>• Desentralisasi fiskal</li> <li>• Pengeluaran pemerintah</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	<i>Common Effect Model</i>	Desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/ kota provinsi Kalimantan Timur

### C. Kerangka Berfikir

Dalam mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah dituntut untuk aktif dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin. Upaya yang diharapkan tidak hanya sekedar memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, akan tetapi juga upaya untuk memerangi kemiskinan dari akar masalahnya. Dalam penelitian ini Jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah dijadikan variabel-variabel bebas yang secara parsial diduga mempengaruhi jumlah penduduk miskin Indonesia. Jumlah penduduk mempengaruhi tingkat kemiskinan apabila jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhannya yang tinggi akan memperkecil pendapatan perkapita, selain itu, apabila tidak dibersamai

dengan penciptaan capital akan menciptakan tenaga kerja yang menganggur, sehingga kualitas kehidupan menjadi berkurang yang mengarah pada kemiskinan. Pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan disebabkan karena produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga masyarakat harus mengurangi konsumsinya yang berefek kepada menjauh dari kesejahteraan dan beransur-ansur menuju kemiskinan. Pengeluaran pemerintah mempengaruhi kemiskinan disebabkan perannya dalam ekonomi yang dapat membantu masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang pro dan dapat digunakan untuk memperbaiki indikator-indikator pembangunan manusia sehingga dapat mengatasi kemiskinan dari aspek non-pendapatan. Skema hubungan antara kemiskinan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

- : pengaruh secara parsial  
 - - - - - : pengaruh secara simultan

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian yang masih perlu diuji dan dibuktikan secara empiris tingkat kebenarannya dengan menggunakan data-data yang berhubungan. Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian yang relevan dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha1 : jumlah penduduk (X1) berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Y)

Ha2 : pengangguran (X2) berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Y)

Ha3 : pengeluaran pemerintah (X3) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Y)

Ha4 : jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena mengacu pada perhitungan analisis data penelitian yang berupa angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan. Menurut Sugiyono (2013:12) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistika.

Berdasarkan sumber datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2008: 402). Data utama yang diperlukan adalah semua variabel yang diteliti meliputi kemiskinan, jumlah penduduk, pengangguran, pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat sehingga dalam penelitian ini terdapat variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi).

##### **B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012: 31), definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi operasional variabel yang digunakan.

Variabel penelitian adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2010: 161). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan (Y). Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas variabel yang bersifat kuantitatif. Variabel independen kuantitatif yang digunakan adalah jumlah penduduk (X1), pengangguran (X2), dan pengeluaran pemerintah (X3).

Definisi operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan dalam penelitian ini digambarkan menggunakan jumlah penduduk miskin yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan dalam satuan jiwa. Variabel kemiskinan yang digunakan adalah data jumlah penduduk miskin tahun 1986-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Jumlah Penduduk (X1)

Penduduk dalam penelitian ini merujuk pada semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi

bertujuan untuk menetap. Variabel jumlah penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan jiwa tahun 1986-2015 yang datanya diperoleh dari World Bank.

### 3. Pengangguran (X2)

Pengangguran dalam penelitian ini merujuk pada orang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Variabel pengangguran dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan jiwa selama tahun 1986-2015.

### 4. Pengeluaran Pemerintah (X3)

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya pemerintahan dengan cara menentukan besarnya pengeluaran atau belanja pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN. Di APBN nilai yang digunakan adalah rupiah, namun dalam penelitian ini dikonversi kedalam US dollar yaitu dengan membagi nilai pengeluaran pemerintah dengan kurs yang berlaku ketika itu. Data pengeluaran pemerintah diambil dari Bank Indonesia tahun 1986-2015.

## C. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dinyatakan dengan satuan angka-angka (Teguh, 2014: 20). Data kuantitatif disini berupa data runtut waktu (*time series*). Data *time series* merupakan sekumpulan data dari suatu fenomena

tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu misalnya dalam waktu mingguan, bulanan, atau tahunan (Umar, 2011: 42). Data *time series* yang digunakan adalah data tahun 1986-2015.

Berdasarkan cara memperolehnya, data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Menurut Kuncoro (2009: 145) data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006: 158). Dokumentasi diperoleh dari publikasi Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), dan World Bank.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Metode yang digunakan adalah model regresi berganda (*Multiple Regression Model*). Model ini menggunakan program *Eviews 8* dengan prosedur metode OLS (*Ordinary Least Squares*).

##### **1. OLS (*Ordinary Least Squares*)**

Penelitian ini menggunakan metode regresi dengan model OLS atau dikatakan metode kuadrat terkecil biasa. Metode model OLS sesuai dengan penelitian ini karena penelitian ini menganalisis untuk mengetahui pengaruh satu arah dari variabel bebas (jumlah penduduk, pengangguran, pengeluaran pemerintah) terhadap variabel terikat (kemiskinan) dalam

jangka panjang. Analisis OLS menjelaskan bagaimana mencapai hasil estimasi yang dekat dengan kebenaran kenyataannya yang dalam penelitian ini pada jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen dengan kemiskinan sebagai variabel dependen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*. Karena jenis datanya *time series* dan permodelan menggunakan model Ordinary Least Squares (OLS), maka model regresinya adalah:

$$\text{POVERTY}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{JP}_t + \beta_2 \text{P}_t + \beta_3 \text{PP}_t + e$$

Keterangan:

POVERTY = Kemiskinan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi variabel bebas

JP = Jumlah Penduduk

P = Pengangguran

PP = Pengeluaran Pemerintah

e = *error*

Untuk menghitung persamaan regresi melalui model OLS, maka data harus memenuhi asumsi dasar, yaitu: uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Sehubungan dengan pemakaian metode OLS, untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih sah, maka model asumsi klasik harus diuji. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu:

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Suatu model

regresi dikatakan baik apabila memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas dapat diuji dengan beberapa metode, salah satunya dengan Jarque-Bera (JB Test). Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas Jarque-Bera (JB) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila Probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual berdistribusi normal (Iqbal: 18).

b. Uji Linearitas

Uji linearitas merupakan analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear atau tidak (Ali Muhson, 2015: 36). Apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka model regresi memenuhi asumsi linearitas dan sebaliknya, apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari 0,05 maka model tidak memenuhi asumsi linieritas. Nilai Probabilitas F hitung dapat dilihat pada baris F-statistic kolom Probability

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terjadinya hubungan linear antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda (Gujarati, 2003: 359). Multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi yang tinggi atau yang sempurna antar variabel independen

yang terdapat pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya.

Multikol dapat dilihat dari Variance Inflation Factors (VIF). VIF mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksir (estimator) meningkat seandainya ada multikolineritas dalam suatu model empiris. Jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, maka suatu variabel dikatakan berkolerasi sangat tinggi (Gujarati, 2012: 416-417).

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah gejala terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas atau berkorelasi sendiri. Menurut Gujarati (2009: 8), Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau tempat. Menurut Hanke dan Reitsch dalam Sidik (2009: 185), autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Adanya gejala autokorelasi dalam regresi menyebabkan model yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan untuk nilai variabel dependen dari variabel independen tertentu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Pada umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data *time series*. Autokorelasi dapat dilihat dari hasil uji *Breusch-Godfrey* (BG) atau yang biasa dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier*. Uji BG adalah uji yang direkomendasikan oleh Gujarati (2009: 118) untuk menguji autokorelasi dalam sebuah model. Kriteria untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi (Winarno, 2007: 5.29) adalah apabila nilai probabilitas  $Obs*R-squared > \alpha$  (5%), berarti tidak ada autokorelasi. Sebaliknya apabila nilai probabilitas  $Obs*R-squared < \alpha$  (5%), berarti ada autokorelasi.

e. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan (variabel bebas) tidak memiliki nilai varian yang sama, sedangkan asumsi yang dipenuhi dalam regresi linear klasik adalah mempunyai nilai varian yang sama (konstan)/homoskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas akan muncul apabila variabel pengganggu memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lain. Jika varians tidak berubah maka disebut homokedastisitas dan jika tidak disebut heterokedastisitas (Ariefianto, 2012:37). Adanya heteroskedastisitas menyebabkan estimasi koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien.

Model regresi yang baik adalah yang bebas dari gejala heteroskedastisitas. Pengujian masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *White Heteroscedasticity Test* (Gujarati: 2012).



Jika nilai probabilitas *Obs\*Rsquared* lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2009:219). Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Apabila nilai *prob F* < taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### b. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2009:218). Pengambilan keputusan berdasarkan apabila nilai *p-value* < taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

#### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan

baik atau seberapa besar sumbangannya terhadap variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ). nilai  $R^2$  berkisar antara nol sampai dengan satu. Semakin besar  $R^2$  semakin baik modelnya. Nilai  $R^2$  kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro, 2009:220).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

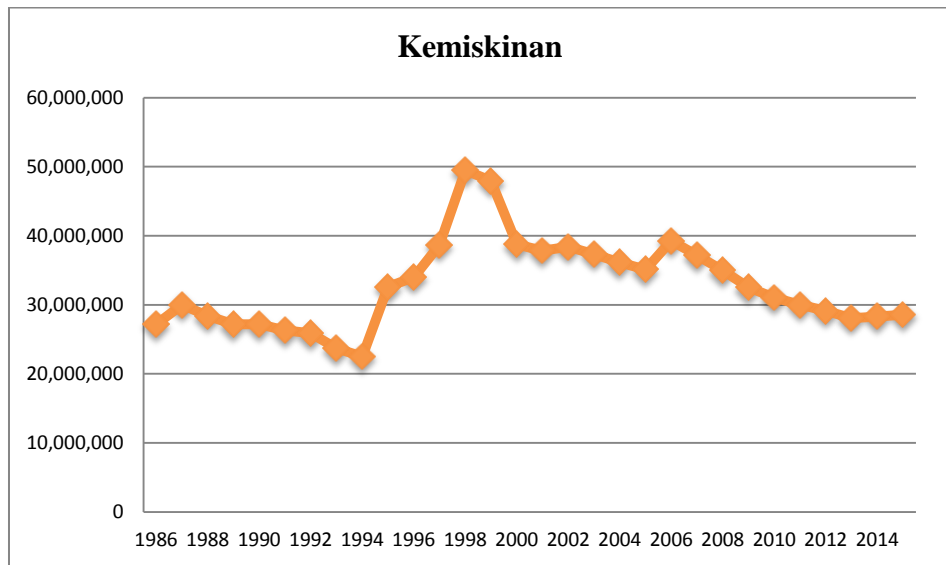
Pada bab IV ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian yang didapat dari hasil analisis ekonometrika setelah diolah menggunakan *Software EViews 8* dengan menggunakan data *times series* model OLS (*Ordinary Least Square*).

#### **A. Deskripsi Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder. Data diperoleh dari dokumen cetak maupun publikasi milik Bank Indonesia, BPS, dan World Bank. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan data kemiskinan, jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah periode tahun 1986-2015. Berikut akan disajikan deskripsi data dari setiap variabel yang diperoleh di lapangan.

##### **1. Deskripsi Kemiskinan**

Kemiskinan dalam penelitian ini digambarkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 1986-2015 dalam satuan jiwa. Pada gambar 2 grafik kemiskinan dibawah secara umum jumlah penduduk miskin tahun 1986-1994 mengalami penurunan tiap tahunnya, walaupun pada tahun 1987 mengalami peningkatan.



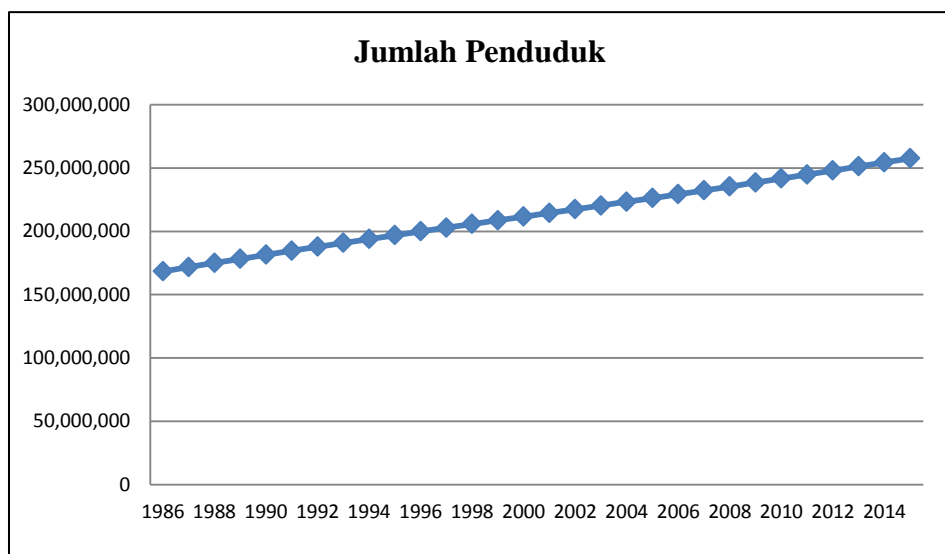
Gambar 2. Grafik Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015 dalam Jiwa

Menurut gambar 2 grafik kemiskinan di atas, peningkatan kemiskinan terjadi pada tahun 1995-1998. Faktor yang mempengaruhi peningkatan ini karena krisis ekonomi global dan juga krisis moneter yang dialami bangsa Indonesia pada saat itu, serta harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, hal ini ditandai dengan tingkat inflasi yang tinggi pada waktu itu. Dengan keadaan tersebut banyak penduduk yang tergolong tidak miskin tetapi penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Kemudian setelah tahun 1998 perekonomian Indonesia mulai membaik, tahun 1999 kemiskinan mulai menurun walaupun masih tergolong tinggi, seterusnya turun sampai tahun 2005 dan pada tahun 2006 tingkat kemiskinan meningkat lagi, setelah tahun 2006 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini tidak terlepas dari segala upaya dan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui

program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya selalu naik tiap tahun.

## 2. Deskripsi Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1986-2015 dalam satuan jiwa. Indonesia adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak bahkan menempati lima besar penduduk terbanyak di dunia. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami kenaikan, berikut data jumlah penduduk Indonesia tahun 1986-2015.

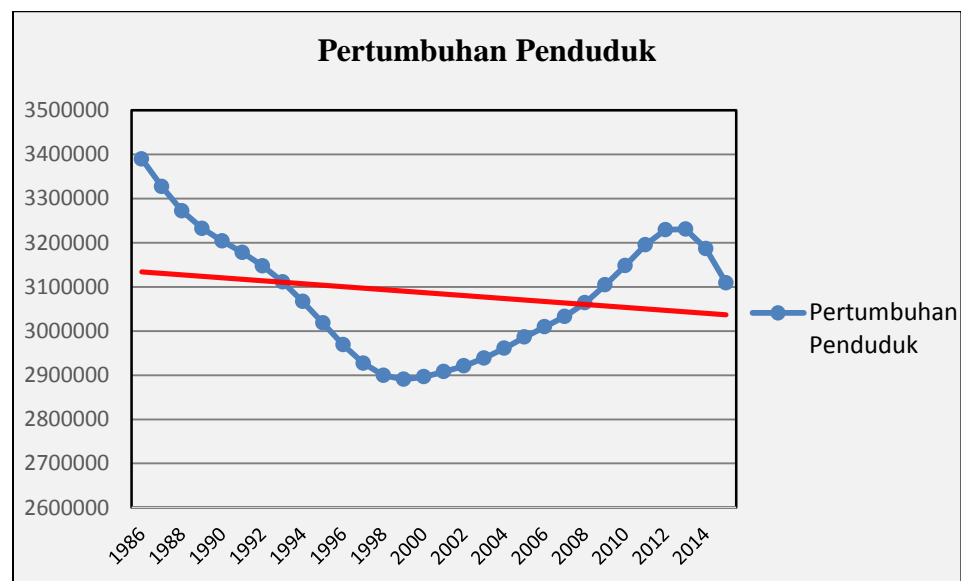


Gambar 3. Grafik Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1986-2015 dalam Jiwa

Terlihat pada gambar 3 grafik jumlah penduduk, tahun 1986 jumlah penduduk 168,40 juta jiwa, kemudian 10 tahun berikutnya tahun 1996 jumlah penduduk sebesar 199,92 juta jiwa, 10 tahun kemudian tahun 2006 jumlah penduduk sebesar 229,26 juta jiwa, berlanjut pada tahun 2015 total jumlah penduduk Indonesia berjumlah 257,56 juta jiwa.

Dengan demikian Indonesia menempati posisi ke- 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.

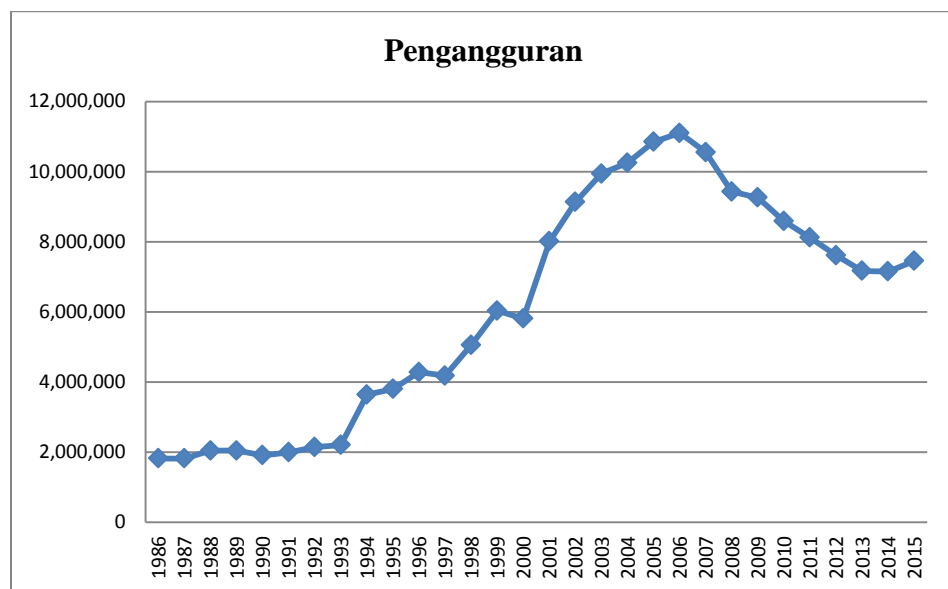
Selain itu, walaupun Indonesia menempati posisi ke- 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, Indonesia mengalami tren penurunan laju pertumbuhan penduduk pada tiga dekade terakhir. Ini berhubungan dengan penurunan tingkat fertilitas. Penurunan tingkat fertilitas ini merupakan dampak dari keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Program KB mulai dicanangkan pada tahun 1971. Pada awalnya program KB hanya mencakup Pulau Jawa dan Bali, baru pada tahun delapan puluhan program KB mencakup seluruh provinsi. Oleh karena itu, pengaruh program KB dalam penurunan tingkat fertilitas baru terlihat pada tahun delapan puluhan, begitu juga penurunan laju pertumbuhan penduduk. Berikut data pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 1986-2015.



Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 1986-2015 dalam Jiwa

### 3. Deskripsi Pengangguran

Data pengangguran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pengangguran dalam satuan jiwa mulai tahun 1986-2015. Data tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kontribusi jumlah pengangguran terhadap kemiskinan. Pengangguran Indonesia dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Berikut data pengangguran Indonesia tahun 1986-2015.

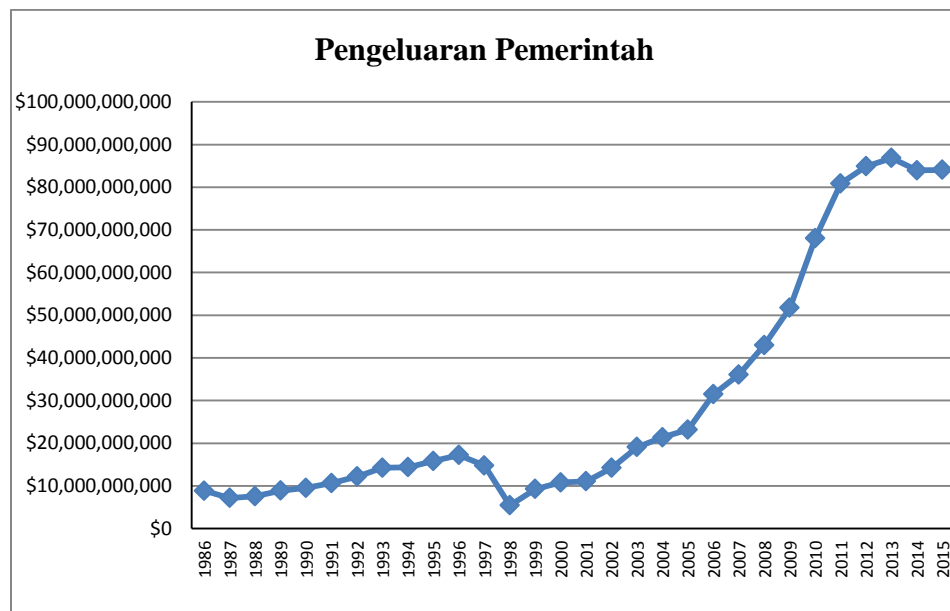


Gambar 5. Grafik Pengangguran Indonesia Tahun 1986-2015 dalam Jiwa

Terlihat pada gambar 5 grafik pengangguran bahwa pengangguran selalu ada perubahan baik kenaikan maupun penurunan. Namun, secara umum pengangguran mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun yang menciptakan tenaga kerja baru. Pengangguran timbul karena ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja.

#### 4. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah

Data pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah tahun 1986-2015 dalam US dollar. Data tersebut digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh anggaran dalam APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut data pengeluaran pemerintah Indonesia tahun 1986-2015.



Gambar 6. Grafik Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1986-2015 dalam Dollar AS

Dari gambar 6 grafik pengeluaran pemerintah Indonesia di atas, terlihat pada tahun 1998, bertepatan dengan reformasi setelah terjadinya krisis yang dialami Indonesia, pengeluaran pemerintah menurun drastis. Pos pengeluaran pemerintah terbesar pada tahun 1998 adalah bunga utang negara dan pos pengeluaran pemerintah terbesar setiap tahunnya



sementak 1997 adalah subsidi dan bunga utang negara. Berikut data pengeluaran pemerintah Indonesia tahun 1986-2015.

## B. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan estimasi data *time series* pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Untuk mengestimasi data *time series* peneliti menggunakan permodelan OLS (Ordinary Least Squares). Sebelum menggunakan OLS, harus dilakukan uji asumsi klasik.

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Jarque-Bera (JB Test) dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila prob. Jarque-Bera lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal, berikut ini adalah hasil uji normalitas:

Tabel 2. Uji Normalitas

<i>Tests for Normality</i>	
Skewness	-0.585459
Kurtosis	4.342494
Jarque-Bera	3.966676
Probability	0.137609

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan uji normalitas di atas, probabilitas sebesar 0,137609 menunjukkan bahwa prob. > 5%. Sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

## 2. Uji Linearitas

Uji linieritas merupakan analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear atau tidak (Ali Muhson, 2015: 36). Apabila nilai Prob. Fhitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka model regresi memenuhi asumsi linieritas dan sebaliknya, berikut ini adalah hasil uji linearitas:

Tabel 3. Uji Linearitas

<i>Ramsey RESET Test</i>		
	Value	Probability
t-statistic	0.777445	0.4442
F-statistic	0.604420	0.4442
Likelihood ratio	0.716675	0.3972

Sumber: lampiran 4

Nilai Prob. Fhitung dapat dilihat pada baris F-statistic kolom Probability. Pada kasus ini nilainya 0,4442 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi linieritas.

## 3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan ada tidaknya korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas yang terdapat pada model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Dilihat dari Variance Inflation Factors (VIF) seharusnya variabel model yang baik tidak lebih besar dari 10, berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

<i>Variance Inflation Factors</i>	
<i>Variable</i>	<i>Centered VIF</i>
JP	19.91928
LN_P	6.476631
LN_PP	8.516741

Sumber: lampiran 5

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4, diperoleh hasil nilai VIF sebesar 19,91928 pada variabel independen JP (Jumlah Penduduk). Sehingga  $VIF > 10$ , terdapat multikolinearitas pada model ini. Untuk mengatasinya data ditransformasi ke dalam bentuk *Difference* Setelah dilakukan tranformasi data variabel dalam penelitian ini dianggap lolos uji multikolinearitas karena  $VIF < 10$ . Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitassetelah ditransformasikan dalam bentuk *Difference*:

Tabel 5. Uji Multikolinearitas *Difference*

<i>Variance Inflation Factors</i>	
<i>Variable</i>	<i>Centered VIF</i>
D(JP)	1.160322
D(LN_P)	1.205339
D(LN_PP)	1.044920

Sumber: lampiran 5

#### 4. Uji Autokorelasi

Menurut Gujarati (2009: 8), istilah autokorelasi diartikan sebagai korelasi diantara anggota seri dari observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (seperti pada data *time series*) atau tempat (seperti pada data *cross section*). Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antar variabel itu sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau

tempat. Untuk menguji autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Godfrey* (BG). Kreteria untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi adalah nilai Prob. *Obs\*R-squared* lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, H0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai Prob. *Obs\*R-squared* lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

<b><i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:</i></b>			
F-statistic	3.273987	Prob. F(2,24)	0.0553
Obs*R-squared	6.430515	Prob. Chi-Square(2)	0.0401

Sumber: lampiran 6

Dari hasil Uji LM yang telah dilakukan, didapatkan hasil nilai Prob.*Obs\*R-squared* sebesar 0.0401. Karena Prob. *Obs\*R-squared* lebih kecil dari tingkat alpha (0,05), maka model terindikasi terjadi autokorelasi. Untuk menyelesaikan masalah autokorelasi ini dapat digunakan metode *Difference* yaitu dengan cara men-*Difference*-kan seluruh variabel (Nachrowi, 2006: 23). Dengan menggunakan metode tersebut diperoleh hasil Prob. *Obs\*R-squared* sebesar 0.8296, lebih besar dari tingkat alpha (0,05), maka model terindikasi tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 7. Uji Autokorelasi *Difference*

<b><i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:</i></b>			
F-statistic	0.150073	Prob. F(2,23)	0.8615
Obs*R-squared	0.373570	Prob. Chi-Square(2)	0.8296

Sumber: lampiran 6

## 5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model, residual memiliki varians yang konstan atau tidak. Model regresi yang baik harus homokedastis (variens dari residual konstan). Residual memiliki varians yang konstan atau tidak dapat dideteksi dengan uji *Heterokedasticity White*, apabila ditemukan nilai probabilitas *Obs\*Rsquared* lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan menggunakan metode tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

<i>Heteroskedasticity Test: White</i>			
F-statistic	1.838488	Prob. F(9,20)	0.1231
Obs*R-squared	13.58251	Prob. Chi-Square(9)	0.1380

Sumber: lampiran

Dari hasil Uji *White* yang telah dilakukan, didapatkan hasil nilai Prob  $\chi^2$  sebesar 0.1380. Karena nilai Prob lebih besar dari tingkat alpha (0,05), maka model tidak terjadi heteroskedastisitas.

### C. Hasil Estimasi

Penelitian ini menggunakan estimasi data *time series* pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1986-2015. Untuk mengestimasi data *time series* peneliti menggunakan pemodelan OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil Regresi OLS (*Ordinary Least Square*) sebagai berikut.

## 1. Regresi OLS (*Ordinary Least Square*)

Model OLS dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) variabel jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia.

Tabel 9. Hasil Estimasi OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JP	6.257149	3.040882	2.057676	0.0498
P	0.194924	0.071167	2.738965	0.0110
PP	-0.299375	0.060968	-4.910381	0.0000
C	20.05268	1.676617	11.96020	0.0000

Sumber: lampiran 2

Dari hasil estimasi tersebut, dalam jangka panjang probabilitas untuk variable JP (Jumlah Penduduk) sebesar 0,0498, P (Pengangguran) sebesar 0,0110, dan PP (Pengeluaran Pemerintah) sebesar 0,0000 signifikan pada taraf error 5%. Dari hasil estimasi tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien positif dan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien positif dan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien negatif dan nilai probabilitas kurang dari 0,05.

#### D. Uji Statistik

##### 1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 10. Hasil Uji Statistik F

Uji F Signifikansi Simultan	
R-squared	0.765824
Adjusted R-squared	0.738804
F-statistic	28.34252
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: lampiran 2

Berdasarkan hasil analisis tabel 10 menggunakan *software Eviews* 8, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 28.34252 dan probabilitas F sebesar 0,000000. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kemiskinan.

##### 2. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel bebas (jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah) terhadap variabel terikat (kemiskinan). Apabila nilai  $p\text{-value} < \text{tingkat signifikansi } 5\%$  dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji parsial (Uji statistik t) dapat dilihat dari table 11 sebagai berikut.

Tabel 11. Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
JP	6.257149	2.057676	0.0498
P	0.194924	2.738965	0.0110
PP	-0.299375	-4.910381	0.0000
C	20.05268	11.96020	0.0000

Sumber: lampiran 2

a) Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 2.057676 dan probabilitas sebesar 0.0498. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel jumlah penduduk secara individu signifikan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar 6.257149 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia

b) Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 2.738965 dan probabilitas sebesar 0.0110. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel pengangguran secara individu signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar 0.194924 menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia.

c) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -4.910381 dan probabilitas sebesar 0,0000. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel pengeluaran pemerintah secara individu signifikan dalam



mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar -0.299375 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik atau seberapa besar sumbangannya terhadap variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien determinasi atau *goodness of fit* pada tabel 10 diperoleh angka sebesar 0,765824. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 76,58%, hal ini menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 76,58%, sedangkan sisanya sebesar 23,42% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

## E. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis data *times series* pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1986-2015. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan regresi. Model dasar dari penelitian ini adalah:

$$POVERTY_t = \beta_0 + \beta_1 JPt + \beta_2 Pt + \beta_3 PPt + et$$

Kemudian untuk mengestimasi koefisien regresi, beberapa variabel ditransformasikan ke bentuk linier dengan menggunakan logaritma natural ( $\ln$ ) ke dalam model sehingga diperoleh persamaan:

$$\text{POVERTY}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{JPt} + \beta_2 \text{LnPt} + \beta_3 \text{LnPPt} + e_t$$

Hasil estimasi koefisien variabel jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 12. Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Prob.
JP	6.257149	0.0498
P	0.194924	0.0110
PP	-0.299375	0.0000
C	20.05268	0.0000

Sumber: lampiran 2

Dari hasil pengolahan data *times series* dengan estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) pada tabel diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{POVERTY}_t = 20,05268 + 6,257149 \text{JPt} + 0,194924 \text{Pt} - 0,299375 \text{PPt} + e$$

Keterangan:

POVERTY	= Kemiskinan
$\beta_0$	= Konstanta/intersept
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi variabel bebas
JP	= Jumlah Penduduk
P	= Pengangguran
PP	= Pengeluaran Pemerintah
e	= <i>error</i>

Dari hasil estimasi tabel tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien konstanta dalam jangka panjang sebesar 20,05268. Koefisien dari variabel-variabel tersebut secara akumulasi bernilai positif. Karena tidak masuk dalam model, angka-angka sistematis tersebut masuk dalam konstanta, sehingga

menyebabkan konstanta menjadi positif. Dengan bahasa lain apabila variabel bebas yaitu jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah bernilai “nol” maka kemiskinan sebesar 20.05%. Data ini menganalisis bagaimana pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Jika dilihat dari nilai probabilitasnya, konstanta memiliki probabilitas dalam jangka panjang sebesar 0,0000, jumlah penduduk sebesar 0,0498, pengangguran sebesar 0,0110, dan pengeluaran pemerintah sebesar 0,0000 signifikan pada taraf 5% yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut mempengaruhi kemiskinan secara signifikan. Adapun variabel-variabel bebas dalam model yang mempengaruhi kemiskinan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan persamaan regresi, hasil koefisien regresi dari jumlah penduduk adalah arah positif sebesar 6,257149 dengan probabilitas sebesar 0,0498. Nilai signifikansi kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), hal ini berarti bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan tahun 1986-2015 di Indonesia.

Besaran koefisien yang bernilai positif pada 6,257149 menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan kemiskinan sebesar 6,25%. Adanya hubungan positif Antara jumlah penduduk dengan kemiskinan memberikan artian bahwa kenaikan jumlah penduduk membawa dampak terhadap kemiskinan di

Indonesia. Artinya apabila jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut akan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Candra Mustika (2011) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Ada beberapa hal yang menjadikan jumlah penduduk menjadi penghambat pembangunan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Menurut Todaro (2000: 236) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tidak akan menaikkan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Selain itu menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk menunjang tambahan permintaan, namun disisi lain kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang imbasnya prospek pengurangan kemiskinan dan upaya pembangunan semakin jauh.

Berbeda dengan tidak penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Restu Ratri Astuti (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Beberapa hal yang menjadikan jumlah penduduk tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan karena Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena jumlah penduduk yang lebih besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun (Todaro dan Smith, 2006).

## 2. Pengangguran

Berdasarkan persamaan regresi, hasil koefisien regresi dari pengangguran adalah arah positif sebesar 0,194924 dengan probabilitas sebesar 0,0110. Nilai signifikansi kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), hal ini berarti bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1986-2015.

Besaran koefisien yang bernilai positif pada 0,194924 menunjukkan bahwa kenaikan pengangguran sebesar 1% akan diikuti

oleh kemiskinan sebesar 0,19%. Adanya hubungan positif antara pengangguran dengan kemiskinan memberikan artian bahwa kenaikan atau penurunan pengangguran di Indonesia membawa dampak terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya, apabila pengangguran di Indonesia semakin meningkat, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut akan menjadi faktor yang dapat menaikkan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fathul Mufid Cholili (2014) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Pemilihan indikator pengangguran berdasar pada kenyataan bahwa indikator tersebut terkait langsung dengan tingkat pendapatan. Seseorang yang menganggur tentunya tidak memiliki pendapatan dari pekerjaan. Kebutuhan masyarakat yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang dilakukan adalah bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud, jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan begitu akan memberikan dampak domino mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam

kemiskinan dan akan menimbulkan masalah lain yaitu kekacauan politik dan sosial (Sukirno, 2010: 24).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2012), bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Tidak berpengaruhnya pengangguran karena tingkat pendapatan keluarga yang tinggi sehingga mampu menopang biaya hidup bagi keluarga yang masih menganggur. Dengan demikian mereka hanya akan mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan bidang maupun tingkat penghasilan yang diinginkan saja, dan tidak mau mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang dan tingkat upah yang diharapkan.

### 3. Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan persamaan regresi, hasil koefisien regresi dari pengeluaran pemerintah adalah arah negatif sebesar -0,299375 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai signifikansi kurang dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,05), hal ini berarti bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan tahun 1986-2015 di Indonesia.

Besaran koefisien yang bernilai negatif pada 0,299375 menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1% akan diikuti oleh penurunan kemiskinan sebesar 0,29%. Adanya hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan memberikan artian bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah di Indonesia membawa dampak terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya

apabila pengeluaran pemerintah di Indonesia semakin meningkat, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut akan menjadi faktor yang dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seri Jefry Adil Waruwu (2016) yang menyatakan bahwa belanja/pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan terjadi dari akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan banyak dimensi pokok menuntut adanya campur tangan pemerintah yaitu dengan adanya komponen pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata (Amalia, 2015: 183 – 189). Pengeluaran pemerintah yang digambarkan pada APBN pada prinsipnya bertujuan untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Estomihi Hutabarat dan D. Sriyono juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Timur. Umumnya salah satu program prioritas



pemerintah daerah adalah mengurangi kemiskinan, oleh karena itu tujuan desentralisasi adalah pemerintah dapat merespon lebih cepat terutama kebutuhan dasar penduduk miskin. Sepulveda dan Vazques (2010) menemukan penurunan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan dampak langsung dan tidak langsung dari adanya kebijakan desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah memiliki peranan penting melalui kebijakan yang terbuka dan langsung melalui pengeluaran pemerintah.

Menurut Dumairy (1996: 158) pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran itu tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, tetapi juga membiayai kegiatan perekonomian. Ini bukan berarti pemerintah ikut berbisnis, melainkan pemerintah harus berkontribusi menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum, termasuk penanggulangan kemiskinan agar tidak semakin parah dan dapat berkurang.

Menurut Noor (2015:251) kesejahteraan publik sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat. Negara melalui pengeluaran pemerintah dapat memicu aktivitas ekonomi di masyarakat. Pengeluaran pemerintah, idealnya bukan besaran dan volumenya saja yang penting, namun yang juga perlu diperhatikan adalah ketepatan penggunaannya. Apakah dapat merangsang aktivitas ekonomi di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap kesejahteraan publik.

Sebagai contoh, dalam menyusun rencana belanja/pengeluaran perlu dipikirkan juga dampak yang dapat ditimbulkan oleh belanja ini di masyarakat. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran negara/pemerintah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Indonesia selama tahun 1986-2015 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hasil penelitian menghasilkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh meningkatkan kemiskinan sebesar 6,25% dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena Kenaikan jumlah penduduk tidak dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula menambah beban perekonomian. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga membuat prospek pengurangan kemiskinan dan pembangunan menjadi semakin jauh.
2. Jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh terhadap peningkatan kemiskinan sebesar 0,19% dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena Kebutuhan masyarakat yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal yang dilakukan adalah bekerja untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum

apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud, jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan begitu akan memberikan dampak domino mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan.

3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh terhadap penurunan kemiskinan sebesar 0,29% dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di arahkan kepada aktivitas yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi kesejahteraan publik. Selain itu, pos yang menggunakan anggaran besar seperti subsidi-subsidi, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan dan sebagainya yang dinilai tidak produktif justru juga memeberikan sumbangsih terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Secara bersama-sama jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk dan pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Besarnya pengaruh yang disebabkan oleh ketiga variabel independen tersebut adalah sebesar

76,58%, sedangkan sisanya sebesar 23,42% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

## **B. Keterbatasan penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Data *times series* yang kurang banyak, hanya 30 tahun. Karena keterbatasan dalam ketersediaan data untuk beberapa variabel.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan ada banyak sekali, akan tetapi dalam penelitian ini hanya 3 variabel saja yang dianalisis.
3. Periode penelitian ini hanya 30 tahun, sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya.
4. Penelitian yang hanya mengestimasi dalam jangka panjang, sehingga dalam jangka pendek hasil penelitian belum tentu sama dengan penelitian yang dilakukan dalam jangka jangka panjang.

## **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia, sehingga perlu adanya upaya menurunkan laju pertumbuhan penduduk misalkan dengan lebih mengencangkan program KB bagi masyarakat. Selain itu peningkatan jumlah penduduk perlu dibersamai dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan lain yang menunjang kualitas hidup masyarakat.

2. Jumlah pengangguran berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia, sehingga perlu adanya penciptaan lapangan kerja yang memadai bagi para tenaga kerja agar kesejahteraan meningkat.
3. Dari hasil yang diperoleh yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia, maka pemerintah harus berupaya meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah yang pro terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, tentunya dengan di imbangi dengan upaya peningkatan pendapatan nasional dan mengurangi tingkat utang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., madris & Abd. Rahman Razak. (2015). Pengaruh pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Analisis*, Desember 2015, Vol. 4, No. 2: Hal 183 – 189.
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BP STIE YKPN.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bappenas. (2004). *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- BPS. (2013). *Estimasi Parameter Demograf: Tren Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi. Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. (1997). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. (1999). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Estomihi Hutabarat & D. Sriyono. (2015). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2013)*. Jurnal. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Fahma S. F. (2005). *Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Tesis. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fathul M. C. (2014). *Analisis Pengaruh Pengangguran, (PDRB), dan (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)*. Jurnal. Universitas Brawijaya, Malang.
- Fitri A. (2012). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010*. Econosains: Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan Vol 10 No 2.
- Gujarati, D. dan Dawn Porter. (2003). *Ekonomimetrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.

- \_\_\_\_\_. (2009). *Dasar-dasar Ekonometrika jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, M. (1989). *Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Iqbal, M. (2015). Pengolahan Data dengan Regresi Linier Berganda (dengan Eviews 8). Diktat. STIE Perbanas Jakarta. [Internet]. [diakses pada Februari 2017]. Tersedia pada <http://dosen.perbanas.id/wp-content/uploads/2015/08/Regresi-Linier-Berganda-Eviews.pdf>
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- \_\_\_\_\_. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkoesoebroto, G. (1994). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Muhson, Ali. (2005). Aplikasi Komputer. Diktat. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mustika, C. (2011). *Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008*. Jurnal Paradigma Ekonomika vol 1 no 4. Universitas Jambi.
- Nachrowi, D. N. dan Hardius Usman. (2006). *Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*.
- Nanga, M. (2001). *Makroekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Perdana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Restu R. A. (2015). *Analisis Pengaruh Jumlah penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2004-2012*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rusdarti dan Lesta Karolina Sebayang. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Economia (Volume 9, Nomor 1).
- Said, R. (2012). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan social.
- Seri Jefry A. W. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat*



- Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2004*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Sidik, M. dan Saludin Muis. 2009. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soediyono. (1989). *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetrisno. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sri, M. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Ekonomi.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. (2003). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Suryawati, Criswardani. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Jurnal. [http://www.jmpk-online.net/Volume\\_8/Vol\\_08\\_No\\_03\\_2005.pdf](http://www.jmpk-online.net/Volume_8/Vol_08_No_03_2005.pdf).
- Teguh, M. (2014). *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Todaro, Michael P. dan Stephen C. S. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widya N. Z., Djaimi B. dan Syaiful H. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Dominan yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Riau*. Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE) Volume 6, Nomor 2.
- Wijayanti, D. dan Heri Wahono. (2005). *Analisis Konsentrasi Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 1999-2003*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 3, Desember 2005 Hal: 215 – 225.
- Winarno, W. W. (2007). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- World Bank, (2001). World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty.
- World Bank, (2006). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. [Internet]. [diakses pada Desember 2016]. Tersedia pada <http://documents.worldbank.org/curated/en/501361468259732486/text/527910ESW0v20I1100PA0Report0English.txt>

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### Data kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah Tahun 1986-2015

<b>Tahun</b>	<b>Kemiskinan (jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	<b>Pengangguran (jiwa)</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah (US Dollar)</b>
1986	27.200.000	168.402.027	1.820.000	\$8.832.880.709
1987	30.000.000	171.728.916	1.890.000	\$7.157.283.313
1988	28.400.000	175.000.919	2.040.000	\$7.567.064.346
1989	27.200.000	178.233.231	2.010.000	\$8.868.399.647
1990	27.740.000	181.436.821	1.910.000	\$9.535.763.014
1991	26.300.000	184.614.740	1.990.000	\$10.657.020.932
1992	25.900.000	187.762.097	2.140.000	\$12.183.386.537
1993	23.700.000	190.873.248	2.200.000	\$14.257.437.867
1994	22.500.000	193.939.912	3.640.000	\$14.353.349.531
1995	32.600.000	196.957.845	3.800.000	\$15.825.045.991
1996	34.010.000	199.926.615	4.280.000	\$17.204.969.474
1997	38.700.000	202.853.850	4.180.000	\$14.763.283.406
1998	49.500.000	205.753.493	5.050.000	\$5.434.199.705
1999	47.970.000	208.644.079	6.030.000	\$9.246.328.959
2000	38.740.000	211.540.428	5.810.000	\$10.779.164.212
2001	37.870.000	214.448.301	8.010.000	\$11.053.285.490
2002	38.390.000	217.369.087	9.130.000	\$14.199.987.339
2003	37.340.000	220.307.809	9.940.000	\$19.085.795.197
2004	36.150.000	223.268.606	10.250.000	\$21.373.626.199
2005	35.100.000	226.254.703	10.850.000	\$23.182.537.666
2006	39.300.000	229.263.980	11.100.000	\$31.452.113.671
2007	37.170.000	232.296.830	10.550.000	\$36.074.838.967
2008	34.960.000	235.360.765	9.430.000	\$42.980.542.403
2009	32.530.000	238.465.165	9.260.000	\$51.741.295.845
2010	31.020.000	241.613.126	8.590.000	\$68.003.138.200
2011	30.020.000	244.808.254	8.120.000	\$80.891.188.808
2012	29.130.000	248.037.853	7.610.000	\$84.891.845.511
2013	28.070.000	251.268.276	7.170.000	\$86.851.491.925
2014	28.280.000	254.454.778	7.150.000	\$83.959.519.785
2015	28.590.000	257.563.815	7.450.000	\$84.062.114.025

## LAMPIRAN 2

### Hasil Estimasi OLS

Dependent Variable: LN\_POVERTY

Method: Least Squares

Date: 08/31/17 Time: 18:23

Sample: 1986 2015

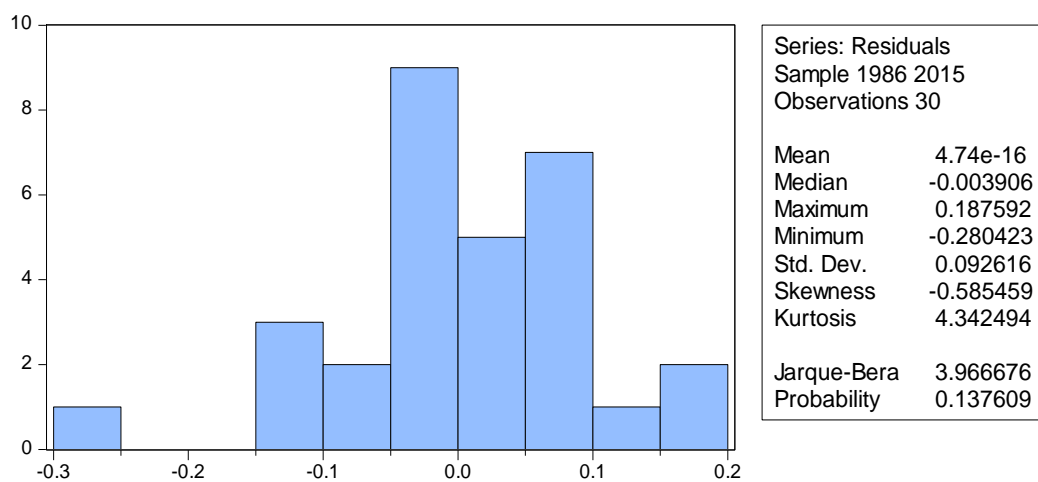
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JP	6.257149	3.040882	2.057676	0.0498
LN_P	0.194924	0.071167	2.738965	0.0110
LN_PP	-0.299375	0.060968	-4.910381	0.0000
C	20.05268	1.676617	11.96020	0.0000
R-squared	0.765824	Mean dependent var	17.28805	
Adjusted R-squared	0.738804	S.D. dependent var	0.191387	
S.E. of regression	0.097813	Akaike info criterion	-1.687955	
Sum squared resid	0.248751	Schwarz criterion	-1.501129	
Log likelihood	29.31933	Hannan-Quinn criter.	-1.628188	
F-statistic	28.34252	Durbin-Watson stat	1.138489	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olahan *Software EViews*

## LAMPIRAN 3

### Uji Normalitas



Sumber: Hasil olahan *Software EViews*

## LAMPIRAN 4

### Uji Linearitas

Ramsey RESET Test  
Equation: UNTITLED  
Specification: LN\_POVERTY JP LN\_P LN\_PP C  
Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	0.777445	25	0.4442
F-statistic	0.604420	(1, 25)	0.4442
Likelihood ratio	0.716675	1	0.3972

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	0.005872	1	0.005872
Restricted SSR	0.248751	26	0.009567
Unrestricted SSR	0.242879	25	0.009715

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	29.31933	26
Unrestricted LogL	29.67767	25

Unrestricted Test Equation:  
Dependent Variable: LN\_POVERTY  
Method: Least Squares  
Date: 08/31/17 Time: 23:24  
Sample: 1986 2015  
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JP	2.08E-07	2.60E-07	0.801491	0.4304
LN_P	6.405261	7.988463	0.801814	0.4302
LN_PP	-9.924384	12.38047	-0.801616	0.4303
C	385.8652	470.5350	0.820056	0.4199
FITTED^2	-0.924033	1.188551	-0.777445	0.4442
R-squared	0.771352	Mean dependent var		17.28805
Adjusted R-squared	0.734768	S.D. dependent var		0.191387
S.E. of regression	0.098566	Akaike info criterion		-1.645178
Sum squared resid	0.242879	Schwarz criterion		-1.411645
Log likelihood	29.67767	Hannan-Quinn criter.		-1.570469
F-statistic	21.08458	Durbin-Watson stat		1.153004
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil olahan *Software EViews*

## LAMPIRAN 5

### Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors  
Date: 08/31/17 Time: 23:11  
Sample: 1986 2015  
Included observations: 30

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
JP	9.25E-18	1336.418	19.91928
LN_P	0.005065	3797.030	6.476631
LN_PP	0.003717	6581.437	8.516741
C	2.811046	8814.488	NA

Sumber: Hasil olahan *Software EViews*

### Uji Multikolinieritas (*Difference*)

Variance Inflation Factors  
Date: 08/31/17 Time: 23:13  
Sample: 1986 2015  
Included observations: 29

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
D(JP)	2.39E-14	672.9176	1.160322
D(LN_P)	0.025847	1.387117	1.205339
D(LN_PP)	0.005787	1.148926	1.044920
C	0.229244	682.5948	NA

Sumber: Hasil olahan *Software EViews*

## LAMPIRAN 6

### Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	3.273987	Prob. F(2,24)	0.0553
Obs*R-squared	6.430515	Prob. Chi-Square(2)	0.0401

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/31/17 Time: 23:00

Sample: 1986 2015

Included observations: 30

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JP	-3.28E-09	3.49E-09	-0.938816	0.3572
LN_P	0.063931	0.076742	0.833064	0.4130
LN_PP	0.063864	0.069463	0.919395	0.3670
C	-1.807008	1.921504	-0.940413	0.3564
RESID(-1)	0.510104	0.206059	2.475521	0.0208
RESID(-2)	0.007056	0.228489	0.030882	0.9756
R-squared	0.214351	Mean dependent var		4.74E-16
Adjusted R-squared	0.050674	S.D. dependent var		0.092616
S.E. of regression	0.090238	Akaike info criterion		-1.795866
Sum squared resid	0.195431	Schwarz criterion		-1.515627
Log likelihood	32.93800	Hannan-Quinn criter.		-1.706215
F-statistic	1.309595	Durbin-Watson stat		2.047904
Prob(F-statistic)	0.293192			

Sumber: Hasil olahan *Software EViews*



### Uji Autokorelasi (*Difference*)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.150073	Prob. F(2,23)	0.8615
Obs*R-squared	0.373570	Prob. Chi-Square(2)	0.8296

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/31/17 Time: 23:04

Sample: 1987 2015

Included observations: 29

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(JP)	-2.23E-08	1.65E-07	-0.135147	0.8937
D(LN_P)	-0.031470	0.176505	-0.178296	0.8601
D(LN_PP)	-0.014940	0.083423	-0.179091	0.8594
C	0.071335	0.512792	0.139111	0.8906
RESID(-1)	-0.082130	0.218033	-0.376688	0.7099
RESID(-2)	-0.099691	0.220919	-0.451256	0.6560
R-squared	0.012882	Mean dependent var		-1.45E-17
Adjusted R-squared	-0.201709	S.D. dependent var		0.093252
S.E. of regression	0.102225	Akaike info criterion		-1.541288
Sum squared resid	0.240349	Schwarz criterion		-1.258399
Log likelihood	28.34868	Hannan-Quinn criter.		-1.452691
F-statistic	0.060029	Durbin-Watson stat		1.979942
Prob(F-statistic)	0.997308			

Sumber: Hasil olahan *Software EViews*

## LAMPIRAN 7

### Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.838488	Prob. F(9,20)	0.1231
Obs*R-squared	13.58251	Prob. Chi-Square(9)	0.1380
Scaled explained SS	17.05002	Prob. Chi-Square(9)	0.0479

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/31/17 Time: 19:13

Sample: 1986 2015

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.002300	24.39738	-0.082070	0.9354
JP^2	3.42E-17	6.96E-17	0.491196	0.6286
JP*LN_P	-2.38E-09	4.13E-09	-0.575477	0.5714
JP*LN_PP	-6.17E-10	2.39E-09	-0.258466	0.7987
JP	3.56E-08	8.06E-08	0.442019	0.6632
LN_P^2	-0.002414	0.059143	-0.040822	0.9678
LN_P*LN_PP	0.023707	0.064051	0.370124	0.7152
LN_P	0.030373	2.236482	0.013581	0.9893
LN_PP^2	-0.000740	0.023913	-0.030933	0.9756
LN_PP	-0.182644	1.383575	-0.132009	0.8963
R-squared	0.452750	Mean dependent var		0.008292
Adjusted R-squared	0.206488	S.D. dependent var		0.015418
S.E. of regression	0.013735	Akaike info criterion		-5.476587
Sum squared resid	0.003773	Schwarz criterion		-5.009521
Log likelihood	92.14880	Hannan-Quinn criter.		-5.327169
F-statistic	1.838488	Durbin-Watson stat		2.363399
Prob(F-statistic)	0.123087			

Sumber: Hasil olahan *Software EViews*